86.500.000





## PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FRINTA PRATAMASARI

2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM** 

3. NHK : **263242** 

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 950.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/39 m2 di KAB / KOTA
 MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR NC 110D VARIO JF13E
Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

MOBIL, HONDA JAZZ GD3 1.5 VTI MT Tahun 2007, HASIL
 SENDIRI Rp. 65.000.000

3. MOTOR, HONDA HONDA X1H02N35M1 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA			Rp.	87.419.160
D.	SURAT BERHARGA	al.	al.	Rp.	36.310.800
E.	KAS DAN SETARA KAS	Kar	Ken	Rp.	28.132.909
F.	HARTA LAINNYA			Rp.	
PI	Sub Total	KPIK	KPK	Rp.	1.188.362. <mark>8</mark> 69
III. HUTANG			Rp.	609.807.605	
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)			Rp.	578.555.264	

## Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-





Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

